

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL

Winda Putri Lestari
windaputri255@gmail.com
Sapari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Local own source revenue and equalization fund the sources of local government revenue. The existence of local own source revenue and equalization fund has made the local government is required to use these funds as efficient as possible and to realize these funds through beneficial development and give satisfaction for community on their own environment. The purpose of this research is to test the influence of local own source revenue and equalization fund to the Allocation of Local Capital Expenditure Budget. The population is all Local Government of districts / cities in East Java Province in 2012-2015 fiscal years. The data is the secondary data which has been obtained from the Audit Board of the Republic of Indonesia East Java Province Representative in the form the result of financial audit report of districts / cities in East Java Province in 2012-2015 fiscal years. The data analysis instrument has been carried out by using multiple linear regressions analysis. Based on the result of the test, it shows that (1) local own source revenue gives positive and significant influence to the Allocation of Local Capital Expenditure Budget of districts / cities in East Java Province in 2012-2015 fiscal years, (2) equalization fund give positive and significant influence to the Allocation of Local Capital Expenditure Budget of districts / cities in East Java Province in 2012-2015 fiscal years.

Keywords: Local own source revenue, equalization fund, capital expenditure

ABSTRAK

Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan merupakan sumber-sumber penerimaan Pemerintah Daerah. Adanya Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan menyebabkan Pemerintah Daerah dituntut untuk sebaik mungkin dalam penggunaan kedua dana tersebut, dalam merealisasikannya lewat pembangunan yang bermanfaat dan memberikan kepuasan bagi masyarakat di daerah sendiri. Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Jawa Timur yang berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015. Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa: (1) Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015, (2) Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal

PENDAHULUAN

Seiring dengan perubahan kepemimpinan nasional dari Orde Baru menuju Orde Reformasi, pola hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat mengalami perubahan, dimana sebelum reformasi, sistem pemerintahan yang dianut bersifat sentralistik, kemudian semenjak tahun 1999 berubah menjadi sistem desentralisasi atau yang sering dikenal sebagai era otonomi daerah yang ditandai dengan adanya Undang-undang

Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah dilakukan revisi menjadi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat, termasuk kewenangan untuk melakukan pengelolaan keuangan daerah sendiri. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari beban anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disusun secara tahunan dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk menjalankan roda pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Banyak hal yang ingin dicapai melalui otonomi daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik.

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja lebih baik dialokasikan untuk hal-hal produktif, misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan, kemudian penerimaan pemerintah hendaknya lebih banyak untuk program-program layanan publik, pendapat ini menyiratkan pentingnya mengalokasikan belanja untuk berbagai kepentingan publik (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Belanja modal (*capital expenditures*) merupakan belanja yang dibutuhkan untuk menyediakan aset tetap yang dibutuhkan pemerintah, baik untuk operasional maupun untuk melaksanakan fungsi pelayanan publik yang bersangkutan seperti biaya yang dikeluarkan untuk pembelian barang-barang modal yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan, antara lain pembelian tanah, gedung, mesin dan kendaraan, peralatan, instalasi dan jaringan, furniture, software, dan sebagainya (Farel, 2015). Di dalam jenis belanja modal diperhitungkan total kebutuhan dana untuk pengadaan aset ditambah pajak dan margin keuntungan pihak ketiga yang akan menjadi pelaksana kegiatan pengadaan asset tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah adalah PAD yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik tetapi yang terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah tersebut banyak digunakan untuk membiayai belanja lainnya. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan-kegiatannya, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal ini Pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Sumber Dana Perimbangan dari pemerintah ini adalah DAU, DAK dan DBH yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan

pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula alokasi belanja modalnya. Masdjojo dan Sukartono (2009) serta Sari dan Indrajaya (2014) menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap alokasi belanja modal. Temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

Terkait dengan Dana Perimbangan (transfer pemerintah pusat) Devita, *et al.* (2014) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan sangat erat antara transfer dari pemerintah pusat dengan belanja pemerintah daerah. Besarnya transfer pemerintah pusat ke pemerintah kota/kabupaten berpengaruh terhadap belanja daerah. Secara spesifik ditegaskan pengurangan jumlah transfer (*cut in the federal grants*) menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Harapan ini tentu saja dapat terwujud apabila ada upaya serius dari pemerintah dengan memberikan berbagai fasilitas pendukung yang mampu menjadi daya tarik investor. Pembangunan infrastruktur di kota atau kabupaten merupakan salah satu faktor yang sangat penting sebagai daya tarik investor, selain iklim investasi yang kondusif di suatu daerah. Daerah dituntut untuk mampu menyediakan dan meningkatkan ketersediaan infrastruktur yang memadai, baik kuantitas maupun kualitas (Haryanto, 2013).

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia terbagi atas Provinsi, Kabupaten dan Kota, dimana setiap masing-masing Provinsi, Kabupaten dan Kota memiliki ciri-ciri dan potensi tersendiri yang berbeda-beda antara daerah satu dengan yang lain, sehingga menimbulkan pendapatan dan pengeluaran yang berbeda pula. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu Provinsi dengan jumlah kabupaten dan kota yang cukup besar. Kondisi daerah di Jawa Timur juga menunjukkan sangat bervariasi, dengan perbedaan antara kota besar dengan kota atau kabupaten yang relatif kecil secara ekonomi tetapi secara wilayah cukup luas. Daerah kota di Jawa Timur secara garis besar terdiri dari daerah dengan basis industri yang kuat, seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan daerah lainnya dengan basis pertanian. Perbedaan kondisi yang cukup bervariasi tersebut tentunya membuat akan berpengaruh pada sumber-sumber pendapatan dan juga belanja yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan permasalahan agar pembahasan penelitian ini lebih jelas dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?, (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal?. Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah : (1) Untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

TINJAUAN TEORETIS

Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara *principal* sebagai pihak pertama dengan *agent* sebagai pihak lainnya yang terikat kontrak perjanjian. Pihak *principal* merupakan pihak yang bertugas membuat suatu kontrak, mengawasi, dan memberikan perintah atas kontrak tersebut. Sedangkan pihak *agent* bertugas menerima dan menjalankan kontrak yang sesuai dengan keinginan pihak *principal* (Purwanti, 2013) Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif (Pemda) menyusun anggaran daerah dalam bentuk RAPBD yang selanjutnya diserahkan kepada DPRD untuk diperiksa. Jika RAPBD telah sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka pihak legislatif (DPRD) akan melakukan pengesahan RAPBD menjadi APBD. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah oleh pihak legislatif (DPRD) dijadikan alat kontrol untuk mengawasi kinerja pihak eksekutif (Pemda).

Anthony dan Govindarajan (2010) mengemukakan konsep teori *agency* sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. *Principal* (dalam hal ini legislatif) mendelegasikan tanggung jawabnya termasuk pendelegasian otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (yang dalam hal ini publik) untuk melakukan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati bersama. Pada pemerintahan, peraturan perundang-undangan secara implisit merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legislatif, dan publik. Asumsi teori *agency* terjadi di antara dua atau lebih individu, kelompok, atau organisasi dimana kontrak antara *principal* dan *agent* tersebut dibuat dengan harapan *agent* akan bertindak/melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* sehingga hal ini menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Darise (2008:135) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Sedangkan menurut Halim (2008:96) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dan sumber-sumber didalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Samudra (2005:51) sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengertian dalam arti sempit, karena penerimaan asli daerah adalah penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, dan lainnya yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah itu yang digali atau dihasilkan oleh daerah yang bersangkutan dan merupakan pula pendapatan daerah yang sah.

Dana Perimbangan (Grants)

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah terbagi menjadi dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil (Aryanto, 2011). Menurut Darise (2008:137) Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antar pemerintah daerah. Kelompok pendapatan berupa pendapatan transfer (Dana Perimbangan) digolongkan menjadi dua jenis pendapatan (untuk provinsi) dan menjadi tiga jenis pendapatan (untuk kabupaten/kota) yaitu Halim (2008:99) : (1) Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan, meliputi: Dana bagi hasil pajak, Dana bagi hasil bukan pajak (sumber daya alam), Dana alokasi umum, Dana alokasi khusus, (2) Transfer Pemerintah Pusat - lainnya, meliputi: Dana otonomi khusus, Dana penyesuaian, (3) Transfer Pemerintah Provinsi meliputi: Pendapatan bagi hasil pajak, Pendapatan bagi hasil lainnya.

Belanja Modal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar mendefinisikan Belanja Modal sebagai pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta

melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah di mana aset tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual. Menurut Sukriy dan Halim (2004), Cara mendapatkan belanja modal dengan membeli melalui proses lelang atau tender. Aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah sebagai akibat adanya belanja modal merupakan syarat utama dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Setiap tahun diadakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara *financial* (Ardhani, 2011).

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Salah satu tujuan utama desentralisasi fiskal adalah terciptanya kemandirian daerah. Pemerintah Daerah diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD (Sidik, 2002). PAD merupakan salah sumber pembelanjaan daerah. Jika PAD meningkat, maka dana yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah akan lebih tinggi dan tingkat kemandirian daerah akan meningkat pula, sehingga Pemerintah Daerah akan berinisiatif untuk lebih menggali potensi-potensi daerah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Tambunan, 2006). Kaitan PAD dengan pengalokasian anggaran belanja modal yaitu sumber pembiayaan untuk anggaran pembangunan. PAD didapatkan dari iuran langsung dari masyarakat, seperti pajak, retribusi, dan lain sebagainya. Tanggung jawab pemerintah daerah kepada masyarakat adalah memberikan pelayanan publik (*public service*) yang baik kepada masyarakat melalui anggaran pembangunan, karena masyarakat telah memberikan sebagian uangnya kepada pemerintah daerah. Bentuk pelayanan publik yang diberikan pemerintahan kepada masyarakat dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai di daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Manurung (2009), Pelealu (2013) serta Masdjojo dan Sukartono (2009) memberikan bukti empiris bahwa PAD mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan PAD. Dengan demikian, ada hubungan antara PAD dengan pengalokasian anggaran pembangunan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika PAD suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Berdasarkan landasan teori dan beberapa hasil penelitian diatas, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Adanya pengaruh yang besar dari Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Jawa Timur masih memiliki ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat dalam mengalokasikan belanja modal. Semakin besar pendapatan Dana Perimbangan suatu provinsi maka semakin besar pula belanja modalnya. Pendapatan daerah yang berupa dana perimbangan menuntut daerah membangun dan mensejahterakan rakyatnya melalui pengelolaan kekayaan yang proporsional dan profesional serta membangun infrastruktur yang berkelanjutan, salah satunya pengalokasian anggaran ke sektor belanja modal.

Melihat adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, maka pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upaya penggalian sumber pendanaan asli daerah agar alokasi belanja modal bisa lebih maksimal dengan menggunakan pendapatan asli daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) menyatakan bahwa terdapat keterkaitan antara dana transfer dari pemerintah pusat dengan belanja modal. Pengurangan jumlah transfer pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah menyebabkan penurunan dalam pengeluaran daerah. Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya, maka peneliti menetapkan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

METODA PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Obyek Penelitian)

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan metode kausalitas (*causal research*), yaitu jenis penelitian dengan karakteristik masalah berupa hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih (Sugiyono, 2008:74), yang mempunyai sifat pengujian hipotesis mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2014:72) dan yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur berjumlah 38 yang terdiri dari 9 Kota dan 29 Kabupaten dengan periode dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini sampel diambil secara *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel yang didasarkan atas kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti. Pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut: (1) Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota tersedia di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) Jawa Timur dari tahun 2012-2015, (2) Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI terkait Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah Kab/Kota dari tahun 2012-2015 tidak terdapat permasalahan.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal yang diperoleh dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2012-2015. Teknik pengumpulan data sekunder ini menggunakan dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan, mencatat dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel-variabel yang diteliti pada penelitian ini diidentifikasi sebagai variabel bebas dan variabel terikat. (1) Variabel bebas (variabel yang tidak dapat dipengaruhi oleh variabel yang lain) yang terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, (2) Variabel terikat (variabel yang bisa dipengaruhi oleh variabel bebas) adalah Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Definisi Operasional

Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, Dalam penelitian ini Pendapatan Asli Daerah yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung Pendapatan Asli Daerah rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$PAD = \text{Pajak Daerah} + \text{Retribusi Daerah} + \text{Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan} + \text{Lain - lain PAD yang sah}$$

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Dalam penelitian ini Dana Perimbangan yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung Dana Perimbangan rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{DAU} + \text{DAK} + \text{DBH}$$

Pengalokasian Anggaran Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Halim, 2008:101). Dalam penelitian ini Anggaran Belanja Modal yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah dari Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Untuk menghitung Belanja Modal rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Tanah} + \text{Belanja Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan} + \text{Belanja Aset Tetap lainnya}$$

Teknik Analisis Data

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data sehingga menjadikan sebuah informasi yang lebih jelas dan mudah untuk dipahami, yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), median, modus, standar deviasi, nilai maksimum, dan nilai minimum masing-masing variabel eksogen, variabel endogen, dan variabel intervening. Secara umum bidang studi statistik deskriptif adalah: pertama, menyajikan data dalam bentuk tabel dan grafik; kedua, meringkas dan menjelaskan distribusi data dalam bentuk tendensi sentral, variasi dan bentuk (Kuncoro, 2008:30).

Pengujian Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Santoso (2009:214) untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dan grafik, dan dasar pengambilan keputusan: (1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, (2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Menurut Santoso (2009:206), pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah: (1) Mempunyai nilai VIF kurang dari 10, (2) Mempunyai angka

TOLERANCE mendekati 1, (3) Koefisien korelasi antar variabel independen haruslah lemah (di bawah 0,5). Jika korelasi kuat, maka terjadi problem multikolinearitas.

Uji Autokorelasi

Menurut Santoso (2009:281), untuk mendeteksi adanya autokorelasi bisa dilihat pada tabel D-W (*Durbin-Watson*) dan secara umum bisa diambil patokan: (1) Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif, (2) Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi, (3) Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara *SRESID* dan *ZPRED* dengan sumbu y adalah y telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di *studentized*, dan dasar analisis: (1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka telah terjadi heteroskedastisitas, (2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi Linier Berganda

Bentuk persamaan dari regresi linier berganda ini adalah:

$$\text{LnBM} = a + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnDP} + e$$

Uji Kecocokan Model (*Goodness of Fit*)

Uji F digunakan untuk melihat signifikansi model yang digunakan dalam penelitian (Ferdinand, 2006:64). Kriteria pengujian: (1) Jika $\text{Sig} > (\alpha) 0,05$, maka model regresi yang dihasilkan tidak baik (tidak layak) untuk digunakan pada analisis selanjutnya, (2) Jika $\text{Sig} < (\alpha) 0,05$, maka model regresi yang dihasilkan baik (layak) dan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya.

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberi hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2011:83).

Pengujian Hipotesis

Uji t digunakan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011:84). Langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut: (1) Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 berhasil ditolak yang berarti secara parsial Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, (2) Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 tidak berhasil ditolak berarti secara parsial tidak terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Hasil analisis deskriptif variabel disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Ln_PAD	140	24.38	29.03	25.9316	.83297
Ln_DP	140	26.66	28.30	27.5964	.38104
Ln_BM	140	24.90	28.21	26.2916	.61909
Valid N (listwise)	140				

Sumber: Data sekunder diolah

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) mempunyai nilai minimum sebesar 24,38. Berdasarkan data diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah terendah dimiliki oleh Kota Batu pada tahun 2012. Pemerintah Daerah Kota Batu memiliki Pendapatan Asli Daerah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kota Batu masih sangat tergantung pada dana transfer yang diperoleh dari Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja modalnya, sehingga Pemerintah Daerah Kota Batu harus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali terus sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai maksimum sebesar 29,03. Berdasarkan data yang diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kota Surabaya lebih besar dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surabaya memiliki kemandirian otonomi daerahnya dengan membiayai pembangunan daerah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur lainnya oleh karena itu ketergantungan pembiayaan dana transfer dari Pemerintah Pusat semakin kecil.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Dana Perimbangan mempunyai nilai minimum sebesar 26,66. Berdasarkan data diketahui bahwa Dana Perimbangan terendah dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Mojokerto pada tahun 2012. Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Mojokerto lebih kecil bila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Dengan rendahnya Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kota Mojokerto menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Mojokerto mempunyai tingkat ketergantungan rendah pada pemerintah pusat sehingga bisa mandiri dalam memenuhi belanja modalnya, terutama dalam mendanai kegiatan khususnya yang menjadi wewenang daerah.

Nilai maksimum Dana Perimbangan sebesar 28,30. Berdasarkan data diketahui bahwa Dana Perimbangan tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2015. Dana Perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro lebih besar bila dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Tingginya Dana Perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro menandakan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro masih tergantung dengan Pemerintah Pusat terutama dalam mendanai kegiatan khususnya yang menjadi wewenang daerah.

Pada Tabel 1 terlihat bahwa Belanja Modal mempunyai nilai minimum sebesar 24,90 . Berdasarkan data diketahui bahwa Belanja Modal terendah dimiliki Pemerintah Daerah Kota Batu tahun 2012. Rendahnya Belanja Modal Pemerintah Daerah Kota Batu menunjukkan

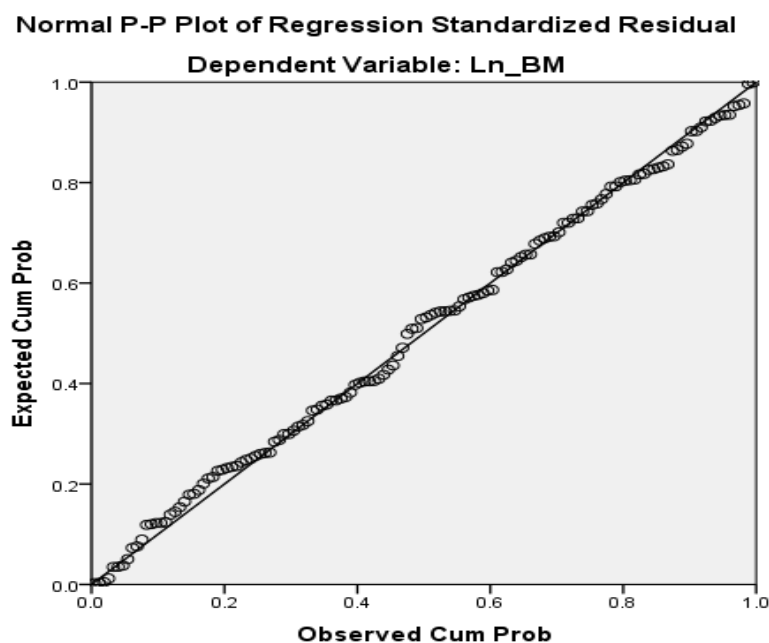
bahwa kebutuhan akan Belanja terhadap Belanja Modal cukup rendah pada tahun anggaran tersebut sebesar 24,90.

Nilai maksimum Belanja Modal sebesar 28,21. Berdasarkan dari data diketahui bahwa Belanja Modal tertinggi dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kota Surabaya pada tahun 2015. Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Surabaya lebih besar bila dibandingkan dengan Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Surabaya menunjukkan bahwa kebutuhan akan Belanja terhadap Belanja Modal cukup tinggi pada tahun anggaran tersebut sebesar 28,21.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Grafik Normal P-P Plot disajikan dalam gambar dibawah ini.



Gambar 1

Grafik P-Plots

Sumber: Data sekunder diolah

Pada grafik normal *probability plot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar berhimpit di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Maka model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas grafik dapat menyesatkan jika tidak berhati-hati secara visual kelihatan normal, padahal secara statistik belum tentu normal.

Untuk menguatkan hasil uji normalitas grafik Normal P-P Plot, uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* (KS) dengan kriteria pengujian apakah suatu persamaan regresi akan dipakai lolos normalitas apabila nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* > (α) 0,05.

Berdasarkan hasil pengujian data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* sebagaimana yang tersaji pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Uji Normalitas dengan Kolmogorov-Smirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	.28617588
Most Extreme Differences	Absolute	.039
	Positive	.033
	Negative	-.039
Kolmogorov-Smirnov Z		.459
Asymp. Sig. (2-tailed)		.985

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji normalitas data dengan *Kolmogorov-Smirnov* (KS) dapat dilihat pada Tabel 2, Nilai *Kolmogorov-Smirnov Z* sebesar 0,459 dengan *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,985 > $\alpha = 0,05$ hal ini berarti data terdistribusi secara normal, hasilnya konsisten dengan uji grafik yang dilakukan sebelumnya, sehingga model regresi ini memenuhi uji normalitas.

Uji Multikolinieritas

Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebasnya. Adapun hasil uji multikolinieritas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut:

Tabel 3
Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Ln_PAD	.558	1.791
	Ln_DP	.558	1.791

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 3 diketahui pada bagian *coefficient* diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk semua variabel tidak ada yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sedangkan nilai *tolerance* semua variabel mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi *multikolinieritas* pada penelitian ini.

Uji Autokorelasi

Uji *autokorelasi* dilakukan untuk mengidentifikasi apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mengetahui ada tidaknya *autokorelasi* dapat dilihat dengan nilai uji *Durbin -Watson* (D-W).

Tabel 4
Hasil Perhitungan Auto-Korelasi
Model Summary^b

Model	Durbin-Watson
1	1.180 ^a

a. Predictors: (Constant), Ln_DP, Ln_PAD

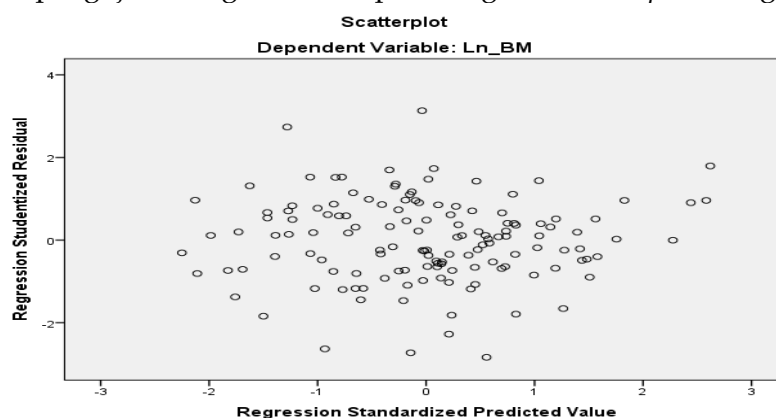
b. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil perhitungan *autokorelasi*, diperoleh nilai *Durbin Watson* adalah sebesar 1,180. Dengan demikian model regresi yang akan digunakan tidak terdapat masalah autokorelasi. Selain itu model regresi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel dependen pada nilai variabel independennya.

Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pengujian dengan SPSS diperoleh grafik *Scatterplot* sebagai berikut:



Gambar 2

Grafik Scatterplot

Sumber: Data sekunder diolah

Dari grafik *scatterplot* pada gambar 2 terlihat bahwa titik-titik yang ada menyebar secara acak. Titik-titik juga terdapat baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak digunakan.

Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil estimasi koefisien regresi disajikan pada Tabel 5 dibawah ini (sumber output SPSS):

Tabel 5
Persamaan Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.315	1.856	-2.325	.022
	Ln_PAD	.377	.039	.507	.000
	Ln_DP	.755	.086	.465	.000

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Data sekunder diolah

Persamaan regresi linier berganda yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

$$\text{Ln_BM} = -4,315 + 0,377\text{Ln_PAD} + 0,755\text{Ln_DP}$$

Goodness of Fit (Uji Kecocokan Model)

Uji Statistik F

Tabel 6
Hasil Uji Statistik F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	41.891	2	20.946	252.078	.000 ^b
	Residual	11.384	137	.083		
	Total	53.275	139			

a. Dependent Variable: Ln_BM

b. Predictors: (Constant), Ln_DP, Ln_PAD

Sumber: Data sekunder diolah

Hasil uji statistik F menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 252,078 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000, karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05 ($\alpha = 5\%$), sehingga simpulannya model yang digunakan dalam penelitian layak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai *R-Square* yang diperoleh disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7
Nilai R-Square
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.887 ^a	.786	.783	.28826	1.180

a. Predictors: (Constant), Ln_DP, Ln_PAD

b. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Data sekunder diolah

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai *R square* sebesar 0,786 atau 78,6%. Hasil ini menunjukkan bahwa 78,6% perubahan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan sedang sisanya 21,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Dari hasil pengujian hipotesis secara parsial dengan menggunakan SPSS didapat hasil uji t seperti yang tersaji pada Tabel 8 berikut ini:

Tabel 8
Hasil Perhitungan Uji t

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-4.315	1.856		-2.325	.022
	Ln_PAD	.377	.039	.507	9.595	.000
	Ln_DP	.755	.086	.465	8.790	.000

a. Dependent Variable: Ln_BM

Sumber: Data sekunder diolah

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t sebagaimana yang terdapat pada Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,377 dan nilai t hitung sebesar 9,595 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < (\alpha) 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima yang berarti bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan maka semakin meningkat pula Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Situngkir dan Manurung (2009), Masdjojo dan Sukartono (2009), Pelealu (2013) serta penelitian Sari dan Indrajaya (2014) yang menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah maka pengeluaran pemerintah atas belanja modal pun akan semakin tinggi. Pendapatan Asli Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika pemerintah daerah akan mengalokasikan belanja modal maka harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan Pendapatan Asli Daerah yang diterima.

Berdasarkan uraian tersebut memberikan bukti empiris bahwa Pendapatan Asli daerah (PAD) mempengaruhi Pemda dalam pengalokasian belanja modal tahun berikutnya. Peningkatan investasi modal (belanja modal) diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang pada gilirannya akan mampu meningkatkan tingkat partisipasi (kontribusi) publik terhadap pembangunan yang tercermin dari adanya peningkatan Pendapatan Asli daerah. Dengan demikian, ada hubungan antara Pendapatan Asli daerah dengan pengalokasian anggaran pembangunan. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Pendapatan Asli daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan.

Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal

Berdasarkan hasil uji t sebagaimana yang terdapat pada Tabel 8 diatas menunjukkan bahwa variabel Dana Perimbangan memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,755 dan nilai t hitung sebesar 8,790 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < (\alpha) 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa H_2 diterima yang berarti bahwa variabel Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Hal tersebut dapat dilihat pada perolehan Dana Perimbangan yang diterima lebih besar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat digali. Semakin besar pendapatan Dana Perimbangan suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin besar pula belanja modalnya.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Indrajaya (2014) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara Dana Perimbangan dengan alokasi Belanja Modal. Adanya pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal, maka pemerintah daerah harus semakin meningkatkan upaya penggalan sumber pendanaan asli daerah agar alokasi belanja modal bisa lebih maksimal dengan menggunakan pendapatan asli daerah, sehingga Pemerintah Kabupaten/Kota tidak terlalu menggantungkan Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat karena kemandirian Daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Hal ini menunjukkan suatu indikasi yang kuat, bahwa jika Pendapatan Asli Daerah suatu daerah meningkat, maka kemampuan daerah untuk melakukan pengeluaran belanja modal juga akan mengalami suatu peningkatan. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan utama pada pemerintah daerah yang berasal dari kekayaan daerah itu sendiri. Selain itu, Pendapatan Asli Daerah merupakan tolak ukur kemandirian suatu daerah dan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat didaerah.

Dana Perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Mayoritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur masih memiliki ketergantungan terhadap Dana Perimbangan dari pemerintah Pusat. Semakin besar pendapatan Dana Perimbangan suatu Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur maka semakin besar pula belanja modalnya.

Saran

Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerahnya lewat Otonomi Daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap pemanfaatan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur diharapkan lebih mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah dapat ditingkatkan dengan cara memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor pajak daerah dan retribusi daerah serta mengeksplorasi sumber daya didaerahnya.

Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan belanja modal sebaiknya pemerintah daerah lebih mengoptimalkan penganggaran belanja modal agar dapat terealisasi secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

Penelitian ini mengkaji ulang dari penelitian terdahulu, maka penelitian ini masih dimungkinkan untuk dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah variabel yang lebih lengkap dan bervariasi, dengan menambah variabel independen lain baik ukuran-ukuran atau jenis-jenis penerimaan daerah lainnya, maupun variabel non keuangan seperti kebijakan pemerintah dan kondisi makro ekonomi, sehingga hasil dari penelitian akan lebih *representatif*.

Pemerintah daerah harus benar-benar mengoptimalkan potensi-potensi ekonomi di daerahnya untuk menambah penerimaan daerah sehingga dengan kemandirian daerah dapat membiayai pengeluaran-pengeluaran daerah sendiri demi kepentingan masyarakat melalui pembangunan pelayanan publik. Yang nantinya ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat bisa dikurangi.

Analisis dari penelitian ini menggunakan data kuantitatif sekunder yang diambil dari Laporan Realisasi Anggaran APBD dari Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Timur, dalam penelitian selanjutnya sebaiknya dikaji lebih mendalam terkait aspek kualitatif sehingga dapat dinilai tingkat efektivitas kebijakan fiskal pemerintah daerah melalui APBD.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony dan Govindarajan. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Penerbit UPP-AMP. Yogyakarta.
- Ardhani, P. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Aryanto, R. 2011. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah*. 3(2): 1-13.
- Darwanto dan Y. Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik*, Vol. 8(1): 1-19.
- Darise, N. 2008. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Edisi Kesatu. Penerbit PT.Indeks. Jakarta.
- Devita, A., A. Deli dan Junaidi. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*. Vol 2(2): 1-13 ISSN: 2338-4603.
- Farel, R. 2015. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal. Di Kabupaten Bogor. *Signifikan*. Vol 4(2): 189-210.
- Ferdinand, M. 2006. *Metode Penelitian Manajemen*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Cetakan kelima. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Cetakan Ketiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Hariato, D. dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah Dan Pendapatan Per Kapita. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar.
- Haryanto, S. 2013. Analisis Pengaruh PAD, DAU Dan DAK Terhadap Belanja Modal Dan Belanja Barang Dan Jasa Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2012. *Modernisasi*. Vol. 9(2): 140-160.
- Kuncoro, M. 2008. *Metode Kuantitatif*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta.
- Masdjojo, G. N dan Sukartono. 2009. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Serta Analisis *Flypaper Effect* Kabupaten / Kota Di Jawa Tengah Tahun 2006–2008. *Telaah Manajemen (TEMA)*. Vol 6(1): 32-50.
- Pelealu, A. M. 2013. Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012. *Jurnal EMBA*. Vol. 1(4): 1189-1197. ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007. Tentang *Bagan Akun Standar*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.

- Purwanti, E. S. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Samudra, A. A. 2005. *Perpajakan di Indonesia; Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Santoso, S. 2009. *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Cetakan Keempat. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.
- Sari, R. P dan I G.B. Indrajaya. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Alokasi Belanja Daerah Kabupaten Badung *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol 3(9): 420-427. ISSN: 2303-0178.
- Sidik, M. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rangka Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah*. Makalah disampaikan dalam Rangka Orasi Ilmiah. Bandung.
- Situngkir, A. dan J. S. Manurung. 2009. Efek Memiliki Pendapatan Daerah, Pengalokasian Dana Umum, Dan Dana Khusus pada Belanja Modal Di Kota Dan Kabupaten Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, Vol. 4(2): 93-103 ISSN 1907-1442.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Cetakan Keduapuluh. Alfabeta. Bandung.
- Sukriy, A. dan A. Halim. 2004. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Purwokerto.
- Tambunan, T. TH. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.
- _____. Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. Jakarta.